

# **RENSTRA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022**




**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI GORONTALO**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, Perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menyusun RENSTRA Tahun 2017-2022. RENSTRA ini merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2017-2022. Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Gorontalo, November 2017  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Gorontalo  
  
Drs. H. ADRIAN LAHAY, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19601207 198203 1 008

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iv
<b>BAB I. : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sitimatika Penulisan.....	5
<b>BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESTAUAN BADAN KESATUAN BANGSA &amp; POLITIK PROVINSI GORONTALO.....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya Badan KESBANGPOL Provinsi Gorontalo.....	10
2.2.1 Sumber Daya Manuasi.....	10
2.2.2 Sumber Daya Aset.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan. Badan KESBANGPOL Provinsi Gorontalo .....	12
2.3.1 Pelayanan Internal.....	12
2.3.2 Pelayanan Eksternal.....	13
2.3.3 Capaian Kinerja Pelayanan.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan KESBANGPOL Provinsi Gorontalo .....	24
<b>BAB III. : PERMASALAHANISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL PROVINSI GORONTALO.....</b>	<b>27</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	27
3.2. Telaahan Visi dan Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3. Telaahan RENSTRA K/L.....	32
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
3.6. Faktor Penentu Keberhasilan.....	33

<b>BAB IV. : TUJUAN &amp; SASARAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
Perangkat Daerah.....	41
4.1.1 Tujuan.....	41
4.1.2 Sasaran.....	41
<b>BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI. : RENCANA PROGRAM &amp; KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>45</b>
6.1 Rencana Program.....	45
6.2 Rencana Kegiatan.....	45
<b>BAB VII. : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>52</b>
<b>BAB VIII. : PENUTUP.....</b>	<b>54</b>



# DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HAL
Tebel 2.1	Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo berdasarkan Jabatan	11
Tebel 2.2	Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Pangkat/Golongan	11
Tebel 2.3	Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan	11
Tebel 2.4	Sarana dan Prasarana	12
Tebel 2.5	Capaian Layanan Kinerja <i>Sasaran Pertama</i> Melalui Indikator	14
Tebel 2.6	Persentase Partisipasi Politik pada PILPRES 2014	14
Tebel 2.7	Persentase Partisipasi Politik Pada PILKADA 2015	15
Tebel 2.8	Persentase Partisipasi Politik Pada PILKADA Gubernur Dan Wakil Gubernur 2016	15
Tebel 2.9	Trend Capaian <i>Sasaran Kedua</i> Melalui Indikator Tahun 2013-2017	16
Tebel 2.10	Trend <i>Capaian Sasaran</i> Ketiga Melalui Indikator Tahun 2013-2017	17
Tebel 2.11	Trend Capaian <i>Sasaran Empat</i> Melalui Indikator Tahun 2013-2016	19
Tebel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Periode 2012 - 2017	22
Tebel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Periode 2012 - 2017	23
Tebel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	27
Tebel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	31
Tebel 3.3	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Gorontalo Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	35
Tebel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2018-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo	42

Tebel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2018-2022	43
Tebel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2018-2022	48
Tebel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo	53

**PENDAHULUAN****BAB. I****1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentudengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.

Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di Provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah , yang juga mengatur tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Dalam peraturan lain, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

*“Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Rangka Tugas Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”*

Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, sejalan perubahan dan untuk terselenggaranya good governance dan clean government yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan perencanaan strategis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu, sedangkan **Strategis** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran

Selanjutnya pula disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan dalam periode tahun 2017-2022.

Oleh karena itu perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RENSTRA 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo didasarkan kepada :

- a. Landasan Ideologi Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 10) Kesepakatan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Kamtibmas;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata , Lembaga Teknis Daerah,;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor ...Tahun ..., tanggal .. Desember 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
- 14) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 tahun 2014, , tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo;

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo disusun dengan **MAKSUD** untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Adapun **TUJUAN** penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program

dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Gorontalo.

#### 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

Memuat Tugas Pokok Dan Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

##### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, dan Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.

##### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

##### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 5 (lima) Tahun Kedepan.

##### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk periode 2017-2022.



**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

**GAMBARAN PELAYANAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI GORONTALO****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI****2.1.1 Tugas Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut : *Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Rangka Tugas Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.*

Dalam penyelenggaraan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi dibidang pembinaan politik
- b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dibidang ideology dan wawasan kebangsaan.
- c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi dibidang ketahanan sosial dan ekonomi.
- d. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang fasilitasi pembinaan politik, bina ideology dan wawasan kebangsaan serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi.
- e. Koordinasi, penyusunan kebijakan dan program.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan program kesatuan bangsa dan politik.
- g. Pelaksanaan administrasi badan.

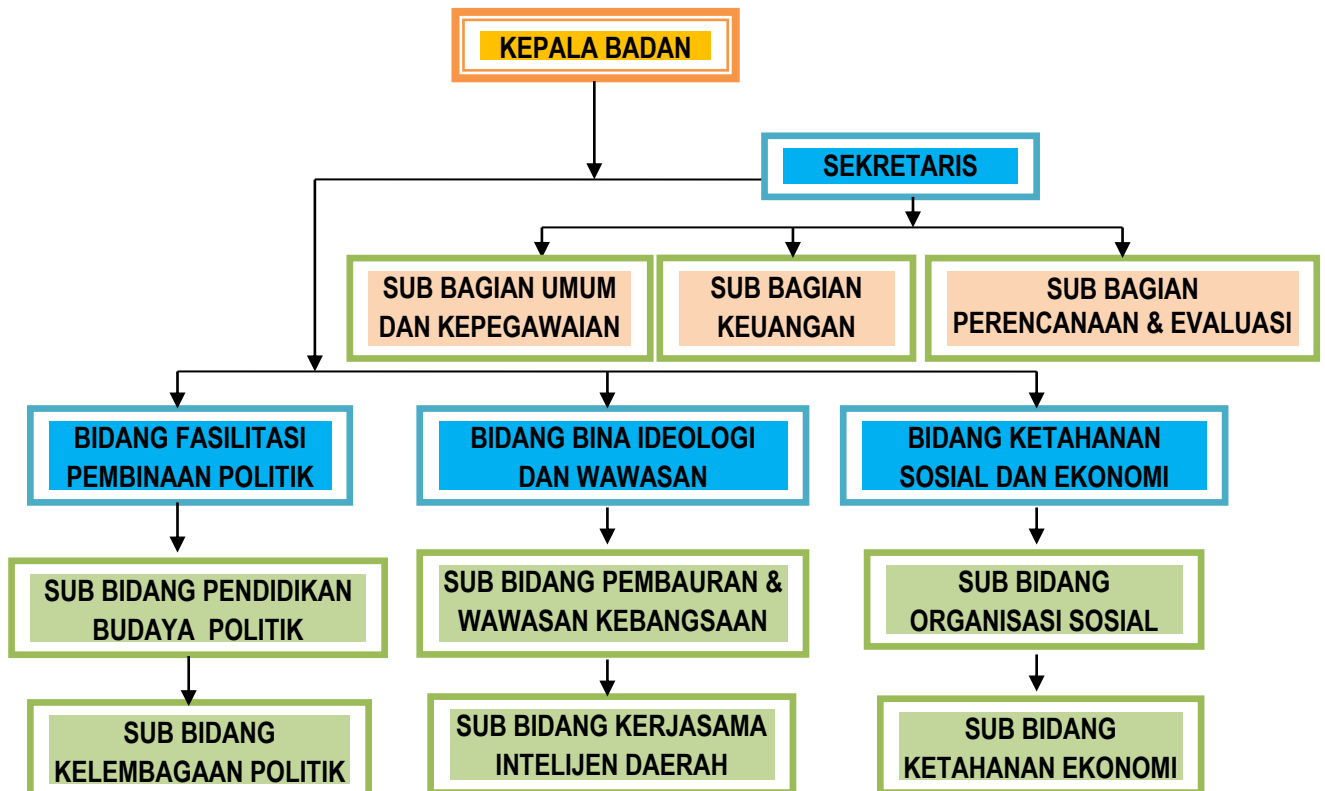
Untuk melaksanakan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja dibidang fasilitasi pembinaan politik, bidang bina ideology dan wawasan kebangsaan, serta fasilitasi bidang ketahanan sosial dan ekonomi.
- b. Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dan tugas dekonsentrasi.

### 2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Gorontalo  
(Perda Nomor 13 Tahun 2013)



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- 1) **Kepala Badan** mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan, dengan fungsi sebagai berikut :
  - a. merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan.
  - b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di semua bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
  - c. penyelenggaraan merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik.

- d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa politik.
- 2) **Sekretariat** mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program Badan.
  - b. Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan.
  - c. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- 3) **Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik**, melaksanakan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempunyai fungsi :
  - a. Mengumpulkan dan mengelola data penyusunan rencana kegiatan.
  - b. Mengadakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama antar lembaga yang terkait.
  - c. Mempersiapkan rekomendasi untuk partai politik.
  - d. Mempersiapkan rencana fasilitasi kegiatan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan Kepala Daerah.
  - e. Mengadakan fasilitasi pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW) anggota legislatif.
  - f. Menyiapkan rumusan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengembangan budaya dan etika politik
  - g. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan budaya politik local.
  - h. Penyiapan rumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan konstitusi dan perundang-undangan.
  - i. Mengkoordinasi penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan legislative, partai politik serta lembaga penyelenggara PEMILU.
  - j. Menyusun laporan dan bahan evaluasi kegiatan.
- 4) **Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**, mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi sumber daya, pranata sosial dan budaya bangsa;
  - c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik;
  - d. Mengkoordinasikan tugas dan program dibidang ideologi dan ketahanan bangsa dengan instansi lembaga terkait;
  - e. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan ideologi.
  - i. Menyusun laporan dan bahan evaluasi kegiatan.
- 5) **Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi**, mempunyai tugas melaksanakan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan sosial dan ekonomi.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang ketahanan sosial dan ekonomi mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mensistemasikan data dan informasi yang berkaitan dengan Orkemas dan LSM.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, memsistemasikan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah ketahanan ekonomi.
- c. Melaksanakan kegiatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka antisipasi dibidang ketahanan sosial dan ekonomi.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pranata sosial, agama dan budaya bangsa.
- e. Menyusun laporan dan bahan evaluasi kegiatan.

## 2.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sampai dengan 31 Juli 2017 adalah berjumlah 53 Orang dengan Jumlah PNS Laki-Laki adalah berjumlah 35 (Tigapuluh Lima) Orang dan PNS Wanita 18 (Delapanbelas) Orang dan 9 (Sembilan) orang tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Gorontalo berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Kepala Badan	1 Org	1 Org	-
2	Sekretaris	1 Org	1 Org	-
3	Kepala Bidang	2 Org	2 Org	-
4	Kepala Sub Bagian/Bidang	9 Org	6 Org	3 Org
5	Staf	39 Org	24 Org	15 Org
	Total Jumlah	53 Org	35 Org	18 Org

Tabel 2.2  
Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Gorontalo Pangkat/Golongan

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah
Golongan IV	4 Org	-	4 Org
Golongan III	20 Org	12 Org	32 Org
Golongan II	14 Org	2 Org	16 Org
Golongan I	1 Org	-	1 Org
Total Jumlah	39 Org	14 Org	53 Org

Tabel 2.3  
Komposisi Aparatur ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Gorontalo Menurut Tingkat Pendidikan

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket.
Setingkat Magister (Strata II)	5	-	5	
Setingkat Sarjana (Strata I)	14	8	22	
Setingkat Diploma (D.III)	1	4	5	
Setingkat SMA/SMK	16	3	19	
Setingkat SMP	2	-	1	
Total Jumlah	38	15	53	

### 2.1.2 Sumber Daya Aset

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi serta dalam mendukung penyelenggaraan proses administrasi didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Jenis>Nama Aset	Nilai Aset (Rp) 2015	Nilai Aset (Rp)2016	Ket.
1.	Tanah	54.870.000,-	54.870.000,-	
2.	Gedung dan Bangunan	1.332.084.000,-	1.332.084.000,-	
3.	Peralatan dan Mesin	1.666.830.000,-	1.767.354.250,-	
4.	Jalan, Jaringan & Instalasi	31.777.500,-	53.077.500,-	
	<b>J u m l a h</b>	<b>3.085.561.500,-</b>	<b>3.207.385.750,-</b>	

## 2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

### 2.3.1 Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;



- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

#### 2.3.2 Pelayanan Eksternal

- 1) Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 3) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA);
- 4) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 7) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8) Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 9) Fasilitasi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

#### 2.3.3 Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo diukur dari tercapainya tujuan dan sasaran melalui capaian indikator kinerja yang ditetapkan, apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dapat dikategorikan baik.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gorontalo melalui Pencapaian Indikator Kinerja khususnya untuk periode 2012-2017 dapat dipaparkan berdasarkan Sasaran sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatkan Pemahaman Dan Partisipasi Politik Masyarakat

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo khususnya pada **sasaran pertama**; *“Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Politik Masyarakat “* dari tahun 2012 s/d tahun 2017 diukur melalui 2 (dua) indikator dapat lihat pada tabel –tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5  
Capaian Layanan Kinerja *Sasaran Pertama* Melalui Indikator

Indikator	Target					Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	15.685	1.000	15.550	16.000	16.500	15.685	1.000	15.550	16.290	16.500-
Persentase partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA, PILPRES dan PILEG		78,54%	81,57 %	82 %	-		78,54	81,57	82 %	-

Pencapaian indokator pada *Sasaran Pertama ini* melalui beberapa perhelatan pesta demokrasi sebagaimana tabel-tabel dibawah, yakni sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Persentase Partisipasi Politik pada PILPRES 2014

No .	Kabupaten/Kota	Data PILPRES 2014		%
		Data Pemilih	Pengunaan Hak Pilih	
1	Kabupaten Gorontalo	280.357	208.397	74,33
2	Kabupaten Boalemo	97.902	76.787	78,43
3	Kabupaten Bone Bolango	106.654	86.124	80,75
4	Kabupaten Pohuwato	97.147	70.403	72,47
5	Kabupaten Gorontalo Utara	83.337	60.784	72,94
6	Kota Gorontalo	138.068	100.953	73,12
	TOTAL JUMLAH	803.465	603.448	75,11

Tabel 2.7  
Persentase Partisipasi Politik Pada PILKADA 2015

No	Kabupaten	DPT	Yang menggunakan Hak Pilih	%
1	Gorontalo	282.262	219.109	77,13
2	Pohuwato	98.317	79.113	79,96
3	Bone Bolango	108.159	95.716	87,64

Tabel 2.8  
Persentase Partisipasi Politik Pada PILKADA Gubernur Dan Wakil Gubernur 2016

No	Kabupaten/Kota	DPT	Yang Menggunakan Hak Pilih	%
1	Kabupaten Gorontalo	276,839	221,037	79,84
2	Kabupaten Pohuwato	96,152	75,682	78,71
3	Kabupaten Bone Bolango	108,933	93,143	85,50
4	Kabupaten Boalemo	99,412	82,973	83,46
5	Kab. Gorontalo Utara	82,084	65,554	79,86
6	Kota Gorontalo	127,709	103,136	80,76

Pencapaian indikator pada *Sasaran Pertama* ini selain melalui dicapai melalui beberapa perhelatan pesta demokrasi juga dicapai melalui beberapa kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

- a. Forum Diskusi Politik
- b. Sosialisasi Etika dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal dan Simulasi PILKADA bagi Pemili Pemula di 6 (enam) Kabupaten/Kota



- c. Monitoring dan Pemantauan Tahapan PILKADA Gubernur Gorontalo dan Kab. Boalemo
- d. Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dan Pendampingan Lembaga Legislatif
- e. Forum Koordinasi Peningkatan Partisiapasi Indeks Demokrasi

**SASARAN 2 :** Meningkatnya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Berjiwa Nasionalisme Dan Cinta Tanah Air

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo khususnya pada **sasaran pertama**; *“Meningkatnya Sikap Dan Perilaku Masyarakat Yang Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Berjiwa Nasionalisme Dan Cinta Tanah Air ”* dari tahun 2013 s/d tahun 2017 diukur melalui 1 (satu) indikator dapat lihat pada tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9  
Trend Capaian *Sasaran Kedua* Melalui Indikator  
Tahun 2013-2017

Indikator	Target					Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan (Wasbang, Cinta Tanah Air, Kesatuan dan Ketahanan Bangsa)	2 Keg	1 Keg	4 Keg	2 Keg	3 Keg	2 Keg	1 Keg	4 Keg	2 Keg	3 Keg

Pencapain indokator pada *Sasaran Kedua* ini melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Kema Bakti Kebangsaan Bagi Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa





b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi FPK



**SASARAN 3.** Meningkatnya Peran Serta Masyarakat, LSM/Ormas Dan Forum-Forum (FPK, FKUB DAN FKDM)

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo khususnya pada **sasaran ketiga** ; *“Meningkatnya Peran Serta Masyarakat, LSM/Ormas Dan Forum-Forum (FPK, FKUB DAN FKDM) ”* dari tahun 2013 s/d tahun 2017 diukur melalui 1 (satu) indikator dapat lihat pada tabel 2.10 di bawah ini :

Tabel 2.10;  
Trend *Capaian Sasaran* Ketiga Melalui Indikator  
Tahun 2013-2017

Indikator	Target					Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rapat Koordinasi	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3
Jumlah Sosialisasi	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
Jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan	50	60	75	100	75	50	60	50	70	75
Jumlah Dokumen Data Base LSM/Ormas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pencapaian indikator pada *Sasaran Ketiga* ini dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

a. Program Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat dengan kegiatan; Sosialisasi Penguatan Peran LSM/Orkemas, Rapat Koordinasi FKUB,

Pemantauan/Monitoring Terhadap aliran sesat dan Hari-Hari Besar Keagamaan, Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi,Perjudian, Peredaran Miras, dan Penyalagunaan Narkoba.



- b. Program Pemantauan dan Dialog Ketahanan Ekonomi  
BBM dari Pemantauan dan Dialog Ketahanan Ekonomi  
Harga-Harga Kebutuhan Pokok, Sarasehan dan Dialog Ketahanan Ekonomi.



**SASARAN 4.** Meningkatnya Stabilitas Daerah Yang Aman, Tertib, dan Kondusif

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo khususnya pada **sasaran keempat** ; *“Meningkatnya Stabilitas Daerah Yang Aman, Tertib, dan Kondusif “* dari tahun 2013 s/d tahun 2017 diukur melalui 1 (satu) indikator dapat lihat pada tabel 2.11 di bawah ini :

Tabel. 2.11  
Trend Capaian *Sasaran Empat* Melalui Indikator  
Tahun 2013-2016

Indikator	Target					Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase antisipasi potensi Konflik Yang Tepat	80 %	85 %	87 %	90 %	92 %	80 %	85%	87 %	90 %	80 %

Pencapaian indokator pada *Sasaran Keempat* ini dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan ; Koordinasi dan Rapat Tim Penangan Konflik Sosial (TPKS) Provinsi Gorontalo
- Dalam pelaksanaan program ini untuk mencapai *Sasaran Keempat* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo melaksanakan deteksi, cegah, dan tangkal terhadap berbagai persoalan menyangkut ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan yang terjadi dimasyarakat, antara lain deteksi, cegah, dan tangkal masalah radikalisme, terorisme, dan masalah sosial lainnya. Selain itu pula deteksi, cegah, dan tangkal juga dilakukan melalui *Rencana Aksi* ,

Adapun rencana *Rencana Aksi* dimaksud adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah untuk mencegah berbagai konflik sosial di daerah, *Rencana Aksi* tersebut dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Gorontalo dan SKPP di Kabupaten/Kota

Untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 terdapat 31 Rencan Aksi, *Rencana Aksi* tersebut divalusi secara periodikal pada setiap 4 (empat) bulan sekali yakni periode pelaporan B03, B08, B012, untuk evaluasi *Rencan Aksi* dilakukan sesuai wilayah, dan untuk Provinsi Gorontalo masuk pada wilayah Timur Barat.





- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban & Keamanan dengan kegiatan; Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Sosialisasi Peraturan Bidang Kesatuan Bangsa, dan Monitoring dan Pengawasan Orang Asing



Tabel 2.12  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT</b>																			
1	Jumlah Masyarakat yang memperoleh pendidikan politik	-	-	-	15.685	1.000	15.550	16.000	16.500	15.685	1.000	15.550	16.290	-	100 %	100 %	100 %	101 %	
2	Persentase Partisipasi Politik masyarakat dalam PILKADA, PILRES dan PILEG	-	-	-		78,54%	81,57 %	82 %	-		78,54	81,57	82 %	-	-	100 %	100 %	100 %	
<b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945, BERJIWA NASIONALISME DAN CINTA TANAH AIR</b>																			
1	Jumlah Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	2	1	4	2	3	1	1	2	2	-	100 %	100 %	100 %	100 %	

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT, LSM/ORMAS DAN FORUM-FORUM (FPK, FKUB DAN FKDM)																		
1	Jumlah Rapat Koordinasi	-	-	-	2	3	3	2	3	2	3	3	2		100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Sosialisasi	-	-	-	2	2	2	2	3	2	2	2	2		100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah LSM/Ormas yang diberi penguatan	-	-	-	50	60	75	100	75	50	60	50	70		100 %	100 %	75 %	70 %
4	Jumlah Dokumen Data Base LSM/Ormas	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %		100 %	100 %
5	Intensitas Monitoring & Pemantauan	-	-	-	2	2	2	2	3	2	2	2	2		100 %	100 %	100 %	100 %
SASARAN 4 : MENINGKATNYA STABILITAS DAERAH YANG AMAN, TERTIB DAN KONDUSIF																		
1	Persentase antisipasi potensi Konflik Yang Tepat	-	-	-	80	85	87	90	92	80	85	87	90	-	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.13  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Periode 2012 – 2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	1 2013	2 2014	3 2015	4 2016	5 2017	Anggar an	Realisa si
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>																	
Belanja Pegawai	3.978.740	3.987.045	3.574.200	3.796.945	4.888.971	3.924.889	3.803.989	3.550.370	3.796.945		98,65	95,41	99,33	99,99			
<b>BELANJANG LANGSUNG</b>																	
Belanja Pegawai				453.640	432.000	3.121.736	3.531.440	3.745.909	443.390		99,01	97,80	94,52	98,00			
Belanja Barang dan Jasa	3.153.020	3.610.860	3.963.156	6.174.495	3.255.110	3.121.736	3.531.440	3.745.909	5.694.996		99,01	97,80	94,52	92,00			
Belanja Modal	90.000	323.000	633.843	121.865	264.994	89.500	321.800	632.258	121.816		99,44	99,63	99,75	99			
<b>TOTAL</b>	<b>7.221.760</b>	<b>7.597.905</b>	<b>7.537.367</b>	<b>10.546.945</b>	<b>8.841.077</b>	<b>7.136.125</b>	<b>7.335.430</b>	<b>7.298.280</b>	<b>10.057.148</b>		<b>98,94</b>	<b>96,55</b>	<b>96,80</b>	<b>95,00</b>			

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI GORONTALO

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo terdapat sejumlah *tantangan* yang dilihat beberapa aspek antara lain aspek politik, social budaya, ekonomi dan keamanan/ketentraman. Adapun tantangan tersebut adalah :

### ✚ Aspek Politik

1. Belum mantapnya system politik secara nasional yang disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
3. Belum diaturnya beberapa masalah politik sehingga hubungan dan tata kerja belum berjalan sebagaimana mestinya.
4. Belum harmonisnya interaksi politik antar lembaga yang ikut menghambat proses demokratisasi tatanan hidup berbangsa dan bernegara.
5. Belum mandirinya infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik, artikulasi politik dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.

### ✚ Aspek Sosial

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika.
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat.
3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
5. Masih adanya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran miras dan penularan HIV/AIDS

### ✚ Aspek Ekonomi

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.

2. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan social

#### ✚ *Aspek Keamanan/Ketentraman*

1. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap gejolak yang timbul.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya dalam memahami potensi konflik yang timbul

Sedangkan *peluang* dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

#### ✚ *Aspek Politik*

1. Meningkatnya terefleksinya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik.
2. Makin berperannya lembaga legislative dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai asset pembangunan nasional.

#### ✚ *Aspek Sosial*

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya local sebagai asset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan.
3. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideology lain yang bertentangan dengan Pancasila.

#### ✚ *Aspek Ekonomi*

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kemampuan sumber daya alam dan obyek wisata sebagai sumber kekuatan perekonomian daerah.

#### ✚ *Aspek Keamanan/Ketentraman*

1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik social, konflik etnis dan gerakan ketidakpuasan masyarakat.

2. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.
3. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejolak konflik.



**PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS  
BADAN KESBANGPOL  
PROVINSI GORONTALO**

**BAB.III**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Sebelum teridentifikasinya permasalahan yang dialami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo selang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini;

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Untuk  
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kecenderungan Mulai Rendahnya Komitmen Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Lokal	Menurunnya Komitmen Kebangsaan, dan Nasionalisme baik Pemerintah Maupun Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin Kerasnya Arus Globalisasi</li> <li>2. Semakin Menurunnya Kepedulian Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya-Budaa dan Nilai-Nilai Lokal</li> <li>3. Kecenderungan kehidupan baik pemerintah dan masyarakat yang materialistis</li> </ol>
2	Adanya Potensi Konflik Akibat Perbedaan Agama Dan Etnis	Menurunnya Sikap Toleransi Anak Bangsa Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tumbuhnya sikap primordialisme di kalangan masyarakat</li> <li>2. Kemudahan Akses Teknologi Dan Informasi</li> <li>3. Semakin Derasnya Arus Informasi Yang Tidak Benar (hoax)</li> </ol>
3	Makin Rendahnya Karakter Dan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila	Munculnya Ideologi-Ideologi Yang Bertentangan Dengan Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>Ideologi bangsa yang sudah kurang mengakar ke dalam hati dan kehidupan Masyarakat</li> <li>Kecenderungan Pola Hidup Masyarakat Kearah Materialistis</li> <li>Sikap Gotong Royong Yang Sudah Mulai Memudar</li> </ol>
4	Belum Optimalnya Kelembagaan Dalam Pemantapan Demokrasi	Belum Tertatanya Struktur Politik (Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik), Pemantapan Budaya Politik, Dinamika Politik Dalam Negeri, Dan Hubungan Antar Instansi, Dalam Rangka Mewujudkan Politik Di Daerah Yang Lebih Demokratis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan yang sering berubah menyebabkan kerancuan</li> <li>Masih Kelemahan-Kelemahan Landasan Konstitusional Bagi Penyelenggaraan Demokrasi</li> <li>Rendahnya instansi pemerintah terkait mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo</li> <li>Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai Untuk Pelaksanaan Tupoksi</li> </ol>
	Belum Optimalnya Penanganan Konflik/Kewaspadaan Dini Di Masyarakat	Belum Optimalnya Kebijakan Dan Fasilitas Penanganan Konflik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat</li> <li>Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai Untuk Pelaksanaan Tupoksi</li> <li>Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Masih Terbatas</li> <li>Belum Maksimlanya Pelaksanaan Standard Operating Procedures (Sop) Penyelenggaraan Pelayanan</li> </ol>

**3.2 TELAAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Gorontalo serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO  
YANG UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Masyarakat Gorontalo

Yang Maju dan Ungul : mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk kondisi daerah yang maju yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari saat ini , sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumber daya manusia

Masyarakat Gorontalo

Yang Sejahtera : menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan PDRB, dan Penurunan Persentase Kemiskinan

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, mengantisipasi tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi “ **Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera**”, dirumuskan Misi Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dalam 5 (lima) rumusan misi sebagai berikut :

*Misi Pertama : Mewujudkan Pengelolaan Pariwisata Dan Sumberdaya Alam Yang Berwawasan Lingkungan & Berkelanjutan;*

Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan

*Misi Kedua : Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah;*

Misi ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan

*Misi Ketiga : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil;*

Misi ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan

*Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;*

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas Intak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat

*Misi Kelima : Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Lebih Melayani;*

Misi ini lebih diarahkan pada menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah

Kelima misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan sosok Gorontalo yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berspirit juara, kompetitif, berekonomi kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi, berkelanjutan pembangunan, dan dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Gorontalo, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu : Misi Lima “*Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Lebih Melayani*”. Dari misi kelima tersebut, pencapaian sasaran yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah “*Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik serta Meningkatkan Peran LSM, Ormas Forum-Forum Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Ketertiban , Politik Daerah ,dan menjaga Kerukunan Umat Beragama*” .

Untuk sasaran tersebut tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah

VISI “ <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA</b> ”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Gorontalo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p><b>Misi Kelima :</b></p> <p><i>Terciptanya Pemerintahan Yang Baik dan Lebih Melayani;</i></p> <p><b>Sasaran Yang Perlu Didukung Oleh Badan KESBANGPOL Adalah :</b></p> <p><i>“Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik serta Meningkatkan Peran</i></p>	<p>1.Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi</p> <p>2.Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas</p> <p>3.Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p> <p>4.Standard</p>	<p>1.Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi</p> <p>2.Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal</p> <p>3.Rendahnya pemahaman masyarakat aupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol Provinsi Gorontalo</p> <p>4.Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang</p>	<p>Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo</p>

LSM, Ormas Forum-Forum Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Politik Daerah, dan menjaga Kerukunan Umat Beragama".	Operational Procedure (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum maksimal	cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi  5. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Gorontalo belum maksimal  6. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur Bakesbangpol yang berakibat pada adanya perbedaan tugas dan fungsi	
---	---	---	--

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,

Dalam Renstra 2015-2019, visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri :

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik :

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.



### 3. Menegakkan Demokrasi :

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

### 4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good goverment, clean goverment melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merumuskan Misi, sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memperhatikan Visi dan Misi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, tampak adanya keselarasan dengan program Kepala Daerah Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, yaitu:

*“Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Rangka Tugas Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”* yang diarahkan untuk pencapaian :

*“Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik serta Meningkatkan Peran LSM, Ormas Forum-Forum Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Ketertiban , Politik Daerah ,dan menjaga Kerukunan Umat Beragama”.*

Terkait dengan Visi Misi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya.

Pada Tabel 3.3 berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo berkaitan dengan Renstra K/L, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.



**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Gorontalo**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat**  
**dan Pendorong Keberhasilan Penangannya**

VISI “Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi, Menjaga Integrasi Bangsa, Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”				
No	Misi (Ditjen) KesbangPol Kemendagri RI	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Gorontalo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.</p> <p>2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.</p> <p>3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.</p> <p>4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah</p>	<p>1.Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi</p> <p>2.Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas</p> <p>3.Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p> <p>4.Standard Operational Procedure (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum maksimal</p>	<p>1.Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi</p> <p>2.Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum optimal</p> <p>3.Rendahnya pemahaman masyarakat aupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Bakesbangpol Provinsi Gorontalo</p> <p>4.Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi</p> <p>5.Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Gorontalo belum maksimal</p> <p>6.Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur Bakesbangpol yang berakibat pada adanya perbedaan tugas dan fungsi</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo</p>

	<p>melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.</p> <p>6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>			
--	--	--	--	--

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo ditinjau dari implikasi dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan (strenghts/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (opportunities/O) dan ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal dengan *SWOT Analysis*. Dengan *SWOT Analysis* tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan *SWOT Analysis* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

### 3.4.1 Analisis Lingkungan Internal

#### 1) *Strength (S)/Kekuatan*

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo mengacu pada visi dan misi yang Pemerintah Provinsi Gorontalo;
- b) Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2013;
- c) Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2014;

#### 2) *Weaknesses (W)/Kelemahan*

- a) Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip 'the right man in the right place' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
- b) Belum optimalnya pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan;
- c) Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
- d) Belum optimalnya dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Gorontalo;
- e) Keberadaan Ormas/LSM belum terdatakan baik secara faktual maupun secara aktual.
- f) Belum optimalnya peran Forum-Forum yang ada

### 3.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

#### 1) *Opportunities (O)/Peluang*

- a) Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
- b) Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c) Kultur masyarakat Gorontalo yang religius dan bersifat gotong royong;
- d) Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Gorontalo;
- e) Penduduk Gorontalo yang baru berjumlah kurang dari 1,5 juta jiwa;

- f) Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan;
- g) Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;

## 2) Threats (T)/Ancaman

- a) Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Gorontalo;
- b) Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c) Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat;
- d) Adanya indikasi tumbuhnya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;
- e) Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
- f) Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- g) Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
- h) Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.

### 3.4.3 Strategi Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan *SWOT Analysis* terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menetapkan strategi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;

- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada; serta
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo harus mewaspadai dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian visi dan misi.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kebijakan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 melalui Nawacita Presiden khususnya pada point 8 dan 9 yakni; Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia dan Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan

manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Gorontalo, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, yaitu :

1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah

Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada serta masih maraknya konflik-konflik yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pemilukada.

2) Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah

Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah dapat dilihat dari tingkat penegakan hukum (law enforcement) yang masih rendah dan peningkatan resistensi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah, antara lain dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi.

3) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun

Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari kecenderungan semakin maraknya konflik dan kekerasan komunal (conflict and communal violence) di tengah masyarakat, seperti tawuran antar warga dan pertentangan antar komunitas/kelompok masyarakat.

4) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional dan transnasional



**TUJUAN DAN SASARAN****BAB.IV****4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH PERANGKAT DAERAH****4.1 Tujuan**

Untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menetapkan **TUJUAN** yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu :

*Meningkatkan Pemahaman Politik,  
Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Ideology Pembauran  
Kebangsaan, Ketahanan Sosial Dan Ekonomi*

**4.2 Sasaran**

Sebagai derivasi dari masing-masing tujuan tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu :

- Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan;
- Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi;
- Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif;

Pada Tabel 4.1 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2017-2022**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					I (2018)	II (2019)	III (2020)	IV (2021)	V (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pemahaman Politik, Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Ideologi Pembauran Kebangsaan, Ketahanan Sosial Dan Ekonomi	Tingkat Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Wasbang, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
		Tingkat Partisipasi Politik	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU Dan PEMILUKADA	81 %	82 %	82 %	82 %	82 %
		Tingkat Ketahanan Ekonomi dan Sosial	Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif	Prosentasi Potensi Konflik Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Skor Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	70	75	80	85	90
				Meningkatnya peran LSM dan ORMAS	50 %	50 %	60 %	60 %	60 %

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. V

Untuk mencapai Tujuan dan Sasarn yang telah ditetapkan seperti tersebut pada Bab IV tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2017-2022.

Dalam tabel 5.1 disajikan Strategi dan Arah Kebijakan untuk setiap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo  
2017-2022

Misi:			
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG UNGGUL, MAJU DAN SEJAHTERA"			
Misi ke V : TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN LEBIH MELAYANI. MENCIPTAKAN APARATUR PEMERINTAH YANG KREATIF, INOVATIF, KOMPETITIF DAN PROFESIONAL SERTA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN, KETERTIBAN DAN POLITIK DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan Pemahaman Politik, Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Ideology Pembauran Kebangsaan, Ketahanan Sosial Dan Ekonomi	1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	1) Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara.	1) Peningkatan pengamalan masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara
	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	2.Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif	1) Meningkatkan upaya deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANK AM	1) Pencegahan kerawanan IPOLEKSOSBUDHANK AM melalui upaya deteksi dini

		<div> <div>2) Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama</div> <div>3) Meningkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan</div> <div>4) Meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Gorontalo</div> <div>5) Peningkatan pemberdayaan Ormas dalam kehidupan masyarakat yang kondusif</div> <div>6) Meningkatkan Pemberdayaan FKUB dalam Menaga dan Memperkokoh Persatuan Umat Beragama</div> <div>7) Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Narko</div> <div>8) Menguraangi Praktek Pengelapan dan Penyeludupan</div> </div>	<div> <div>2) Meningkatkan kualitas Kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama</div> <div>3) Penguatan lembaga keagamaan</div> <div>4) Penguatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat</div> <div>5) Penguatan Peran Fungsi LSM dan ORMAS</div> </div>
	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<div>3. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi</div>	<div>Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.</div>	<div>1) Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik.</div> <div>2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.</div> <div>3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu</div>

**RENCANA PROGRAM  
DAN KEGIATAN,  
SERTA PENDANAAN**

**BAB.VI**

**6.1 RENCANA PROGRAM**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2017- 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gorontalo Barat menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Program-Program tersebut adalah :

- 1) Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 4) Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah
- 6) Program Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana dan SDM Aparatur.
- 7) Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**6.2 RENCANA KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan ssebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 Kegiatan Pada Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan
  - 1) Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air Dan Kesadaran Bela Negara dan Pembaruan Bagi Generasi Muda
  - 2) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
  - 3) Monitoring & Evaluasi Aktifitas Perkembangan Suku, Etnis, Budaya Bangsa
- 5.2.2 Kegiatan Pada Program Pendidikan Politik Masyarakat
  - 1) Fasilitasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Dan Partai Politik

- 2) Sosialisasi Undang-undang & Regulasi Bidang Politik Bagi Pengurus Dan Kader Partai Politik Di Provinsi Gorontalo
- 3) Bimtek Pemanfaatan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bagi Aparatur Kesbang Kab/Kota Dan Partai Politik Dan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
- 4) Monitoring Tahapan Pemilihan PRESIDEN dan Wakil Presiden dan pemilu DPR, DPD, dan DPRD
- 5) Monitoring dan Pemantauan Tahapan PILKADA Gubernur dan Bupati dan Walikota
- 6) Forum Diskusi Politik
- 7) Penguatan Peran Politik Bagi Perempuan
- 8) Forum Koordinasi Peningkatan Indeks Demokrasi
- 9) Penyusunan Database Partai Politik
- 10) Kajian Implementasi Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo

#### 5.2.3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- 1) Rapat Kerja Sama Intelijen Dan Pencegahan Konflik Sosial Dan Terorisme di Provinsi Gorontalo
- 2) Pelatihan Dasar-Dasar Intelegen Bagi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi, Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi Dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Provinsi Gorontalo
- 4) Rapat Kerja Dan Pendataan/Pengawasan Orang Asing
- 5) Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat (Permendagri Nomor 12 Tahun 2006)
- 6) Sosialisasi Kewaspadaan Dan Deteksi Dini Bagi Pemuda Pelajar Terhadap Potensi Terorisme Dan Radikalisme
- 7) Sosialisasi Perbatasan Wilayah dan Kependudukan Bagi Masyarakat Wilayah Perbatasan
- 8) Fasilitasi Cegah Dini Potensi Konflik
- 9) Fasilitasi Rapat Forkopimda

#### 5.2.4 Kegiatan Pada Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Budaya Masyarakat

- 1) Penguatan dan Verifikasi Kelembagaan LSM/ORMAS
- 2) Sarasehan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Umat Beragama



- 3) Dialog dan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba)
- 4) Sosialisasi Pencegahan Praktek Prostitusi, Perjudian, Peredaran Miras
- 5) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
- 6) Fasilisasi Pencegahan Penyakit Masyarakat

#### 5.2.5 Kegiatan Pada Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Daerah

- 1) Penyusunan Laporan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan SEMBAKO
- 2) Dialog Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Daerah
- 3) Cegah Dini Terhadap Praktek Penyalagunaan, Penimbunan SEMBAKO dan Kebutuhan Masyarakat Lainnya

#### 5.2.6 Program Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana dan SDM Aparatur.

- 1) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

#### 5.2.7 Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
- 2) Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2018-2022**







**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
URUSAN****BAB.VII**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2022. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dengan Misi Pemerintahan Provinsi Gorontalo difokuskan pada Misi ke Lima yaitu *“Terciptanya Pemerintahan Yang Baik Dan Lebih Melayani”* dengan sasaran”. *“Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah”*

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indicator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.



Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo**  
**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan Pemahaman Wasbang, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan	87 %	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %
2	Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PEMILU Dan PEMILUKADA	78 %	81 %	82 %	83 %	83 %	83 %	83 %
3	Persentase Potensi Konflik Yang Diselesaikan	95%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Skor Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	69	70	75	80	85	90	90
5	Meningkatnya peran LSM dan ORMAS	45 %	50 %	50 %	60 %	60 %	60 %	60

**PENUTUP****BAB. VIII**

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2017-2022 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2017-2022, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2017-2022.

Mengacu kepada hasil analisis Visi dan Misi pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2012 dan tugas dan fungsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo berperan dalam mensukseskan tujuannya, yakni *“Meningkatkan Pemahaman Politik, Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Ideologi Pembauran Kebangsaan, Ketahanan Sosial Dan Ekonomi”* yang kemudian dapat dilakukan melalui pencapaian sasaran yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi Dan Pembauran Kebangsaan
- Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Demokrasi
- Sasaran 3 : Terwujudnya Stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif

Untuk menyusun strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo sebagai fungsi *“Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Rangka Tugas Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik”* di Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan melalui Analisis SWOT

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan RENSTRA ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insane Bappeda untuk mencapainya berdasarkan hirachi kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang

dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur yang terkait dengan fungsi Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

- 2) Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Bappeda setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
- 3) Mensosialisasikan RENSTRA ini kepada seluruh karyawan dan mitra serta stakeholder



Gorontalo, November 2017  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Gorontalo

Drs. Hi. ADRIAN LAHAY, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19601207 198203 1 008

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2018)		Tahun 1 (2019)		Tahun 1 (2020)		Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Pemahaman Politik, Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Kebangsaan, Ketahanan Sosial & Ekonomi	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembauran Kebangsaan.		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Capaian Penguatan Wasbang & Cinta Tanah air	100%	213.060.000	100%	227.777.778		340.000.000		350.000.000		323.636.246	100%	1.454.474.024		
			1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Kesadaran Bela Negara & Pembaruan Generasi Muda	- Jumlah Peserta Rapat	400 Org	160.000.000	400 Org	177.777.778	400 Org	240.000.000	400 Org	250.000.000	400 Org	220.000.000	2000 Org	1.047.777.778	Bid. Bina Idiologi & Wasbang	Kab/Kota
			2 Fasilitasi Forum Pembaruan Kebangsaan	- Jumlah Rapat	1 Kali	53.060.000	1 Kali	50.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	103.636.246	4 Kali	406.696.246	Bid. Bina Idiologi & Wasbang	Kota Gorontalo
			3 Monitoring & Evaluasi Aktifitas Perkembangan Suku, Etnis, Buadaya Bangsa	- Jumlah Monitoring - Dokomen Laporan	-	-	2 Kali	75.000.000	2 Kali	100.000.000	3 kli	125.000.000	2 Kali	75.000.000	9 Kali	375.000.000	Bid. Bina Idiologi & Wasbang	Kab/Kota
	Meningkatnya Partisipasi politik Masyarakat		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase angka Partisipasi Politik Masyarakat	81%	716.732.678	81%	1.326.925.198	81%	972.741.412	82%	1.484.008.672	82%	1.712.768.218	82%	6.213.176.177		
			1 Fasilitasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat & Partai Politik	- Jumlah Masyarakat Yg Diberikan Pemahaman Politik Melalui Tatap Muka dan Media		-	100 Org	100.000.000	100 org	175.000.000	100 org	187.670.006	100 org	213.261.371	400 Org	675.931.377	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kab/Kota
			2 Sosialisasi UU dan Regulasi Bidang Politik Bagi Pengurus & Kader Partai Politik	- Jum. Peserta Sosialisasi		-	75 Org	75.000.000	75 Org	100.000.000	75 Org	112.359.551	75 Org	127.681.307	375 Org	415.040.858	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kota Gorontalo
			3 Bimtek Pemanfaatan dan Pertanggungawaban Bantuan Keuangan Bagi Kesbangpol Kab/Kota dan Partai Politik dan Verifikasi Bantuan Bantuan Keuangan Parpol	- Jumlah Peserta Bimtek	100 Org	88.141.807	100 Org	97.935.341	100 Org	150.000.000	100 Org	168.539.326	100 Org	181.521.961	500 Org	686.138.435	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kota Gorontalo
			4 Monitoring Tahapan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan PEMILU DPR/DPRD/ DPD	- Jumlah Pelaksanaan Monitoring - Dok. Pelaporan		-	25 Kali	450.000.000		-		-		-	25 Kali	450.000.000	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kab/Kota
			5 Monitoring & Pemantauan Tahapan PILKADA Gubernur/Bupati/Walikota	- Jumlah Pelaksanaan Monitoring - Dok. Pelaporan	20 Kali	200.000.000				-	20 Kali	400.000.000	20 Kali	350.000.000	40 Kali	950.000.000	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kab/Kota
			6 Forum Diskusi	- Jumlah Peserta Forum	100 Org	100.000.000	100 Org	100.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	168.539.326	100 Org	142.462.143	500 Org	661.001.469	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kota Grto
			7 Penguatan Peran Partai Politik Bagi Perempuan	- Jumlah Peserta	150 Org	140.449.064	150 Org	156.054.516	150 Org	175.342.152	150 Org	197.013.654	150 Org	213.879.153	750 Org	882.738.539	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kota Grto
			8 Forum Koordinasi Peningkatan Indeks Demokrasi	- Jumlah Peserta Forum	200 Org	100.000.000	200 Org	100.000.000	200 Org	112.359.551	200 Org	126.246.686	200 Org	143.462.143	1000 Org	582.068.380	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik	Kota Grto
			9 Penyusunan Data Base Politik	- Jumlah Dokumen		-	-	1 Dok	150.000.000	-		-	-	1 Dok	200.000.000	2 Dok	350.000.000	Bid. Fasilitasi Pembinaan Politik

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2018)		Tahun 1 (2019)		Tahun 1 (2020)		Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Terwujudnya stabilitas Daerah Yang Aman dan Kondusif		10 Kajian Implementasi Kebijakan-Kebijakan Pemp. Prov. Gorontalo	- Jumlah Dokumen	12 Dok	88.141.807	12 Dok	97.935.341	12 Dok	110.039.709	12 Dok	123.640.123	12 Dok	140.500.139	60 Dok	560.257.119	Bid. Fasilitas Pembinaan Politik	Kota Grto
	Tingkat Ketahanan Ekonomi dan Sosial	Program Peningakatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	Persentase Potensi Konflik Yang Terdeteksi dan Tertangani Secara Terpadu	100%	922.769.500		749.655.084	100%	1.143.641.064	100%	882.363.338	100%	1.005.412.884	100%	4.703.841.870	Bid. Bina Idiologi & Wasbang	
		1 Rapat Kerja Sama Intelegen dan Pencegahan Konflik Sosial & Terorisme	- Jumlah Rapat Yang dilaksnakan	2 Kli	51.575.500	2 Kli	57.306.111	2 Kli	100.000.000	2 Kli	112.359.551	2 Kli	127.681.307	10 Kali	448.922.469	Bid. Bina Idiologi & Wasbang	Kota Gtlo
		2 Pelatihan Dasar-Dasar Intelegen Bagi Aparat Badan KESBANGPOL Prov, Kab/Kota	- Jumlah Peserta Pelatihan	50 Org	119.927.500			50 Org	120.000.000					100 Org	239.927.500	Bid. Bina Idiologi & Wasbang	Kota Gtlo
		3 Koordinasi & Evaluasi Rencana Akasi Penanganan Konflik Sosial	- Jumlah Dokumen Tim TPKS	3 Dok	396.160.000	3 Dok	300.000.000	3 Dok	337.078.652	3 Dok	378.740.058	3 Dok	430.386.430	15 Dok	1.842.365.139	Idiologi & Wasbang	Kab/Kota
		4 Rapat Kerja & Pendataan / Pengawasan Orang Asing	- Jumlah Dokumen - Rapat Kerja	1 Dok 1 Kali	61.350.000	1 Dok 1 Kali	68.166.667	1 Dok 1 Kali	76.591.760	1 Dok 1 Kali	86.058.158	1 Dok 1 Kali	97.793.361	5 Kali 5 Dok	389.959.946	Idiologi & Wasbang	Kota Gtlo
		5 Fasilitasi Pemberdayaan FKDM ( Per Mendagri No 12 Tahun 2016)	- Jumlah Dokumen - Rapat Kerja FKDM	1 Dok 2 Kali	75.000.000	1 Dok 2 Kali	83.333.333	1 Dok 2 Kali	93.632.959	1 Dok 2 Kali	105.205.572	1 Dok 2 Kali	119.551.786	5 Kali 10 Dok	476.723.650	Idiologi & Wasbang	Kota Gtlo
		6 Sosialisasi Kewaspadaan & Deteksi Dini Bagi Pemuda Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	- Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Org	75.235.000	100 Org								100 Org	75.235.000	Idiologi & Wasbang	Kab/Kota
		7 Sosialisasi Perbatasan Wilayah dan Kependudukan Bagi Masyarakat Wil. Perbatasan	- Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Org	67.075.000		-	100 Org	100.000.000		-		-	200 Org	167.075.000	Idiologi & Wasbang	Kab/Kota
		8 Fasilitasi Cegah Dini Potensi Konflik	- Jumlah Peserta Kegiatan		-	200 Org	150.848.973	300 Org	200.000.000	300 Org	100.000.000	200 Org	130.000.000	1000 Org	580.848.973	Idiologi & Wasbang	Kab/Kota
		9 Fasilitasi Rapat FOKOPINDA	- Jumlah Rapat	4 Kali	76.446.500	6 Kali	90.000.000	6 Kali	116.337.693	6 Kali	100.000.000	6 Kali	100.000.000	28 Kali	482.784.193	Idiologi & Wasbang	Kota Gtlo
	Program Peningakatan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	100%	481.099.694		465.000.000	100%	629.213.483	100%	714.447.065	100%	812.662.772	100%	3.102.423.015	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi		
	1 Penguatan & Verivikasi Kelembagaan LSM dan ORMAS	- Jmlh LSM, ORMAS Yang Diberi Penguatan - Data Base LSM & ORMAS	20 LSM/ ORMAS 1 Dok	111.128.750	20 LSM/ ORMAS 1 Dok	115.000.000	20 LSM/ ORMAS 1 Dok	129.213.483	20 LSM/ ORMAS 1 Dok	145.183.689	20 LSM/ ORMAS 1 Dok	164.981.465	100 LSM/ ORMAS 5 Dok	665.507.387	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kab/Kota	
	2 Saresahan Pemeliharaan Keharmonisan & Kerukunan Umat Beragama	- Jumlah Peserta Sarasehaan	100 Org	63.295.000	100 Org		-	100 Org	100.000.000	100 Org	112.359.551	100 Org	127.681.307	500 Org	403.335.858	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kab/Kota
	3 Dialog dan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan & Peredaran Gelap Narkoba)	- Jumlah Peserta Sosialisasi	200 Org	73.045.057	200 Org	100.000.000	200 Org	100.000.000	200 Org	125.000.000	200 Org	110.000.000	1000 Org	508.045.057	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kota Gtlo	
	4 Sosialisasi Pencegahaan Praktek Prostitusi, Perjudian dan Peredaran Miras	- Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Org	64.635.000	100 Org									64.635.000	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kab/Kota	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2018)		Tahun 1 (2019)		Tahun 1 (2020)		Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

			5 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	- Jumlah Peserta Rakor	75 Org	56.775.000	75 Org	75.000.000	75 Org	100.000.000	75 Org	100.000.000	75 Org	110.000.000	425 Org	441.775.000	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kab/Kota
			6 Fasilisasi Penyegahan Penyakit Masyarakat	- Jumlah Peserta Kegiatan	300 Org	112.220.887	300 Org	175.000.000	300 Org	200.000.000	300 Org	231.903.826	300 Org	300.000.000	1500 Org	1.019.124.713	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kota Gtlo
			Program Peningakatan Ketahanan Ekonomi	Persentase Capaian Penguatan Ketahanan Ekonomi	100%	253.915.886		250.000.000	100%	355.116.118	100%	325.000.000	100%	568.270.513	100%	1.752.302.517	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	
			1 Penyusunan Laporan Perkembangan Stabilitas dan Ketersedian SEMBAKO	- Jumlah Dokumen Laporan	5 Dok	49.820.000		-		-		-		-	5 Dok	49.820.000	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kota Gtlo
			2 Dialog Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi	- Jumlah Peserta Kegiatan	100 Org	87.875.000	100 Org	100.000.000	100 Org	100.000.000	100 Org	125.000.000	100 Org	150.000.000	500 Org	562.875.000	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kota Gtlo
			3 Cegah Dini Terhadapap Praktek Penyalagwaan, Penimbunan SEMBAKO, dan Kebutuhan Masyakat Lainnya	- Jumlah Dok Laporan	-	116.220.886	3 Dok	150.000.000	3 Dok	255.116.118	3 Dok	200.000.000	3 Dok	418.270.513	12 Dok	1.139.607.517	Bid. Ketahan Sosial Ekonomi	Kab/Kota
			Program Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Serta SDM Aparatur	Persentase peningkatan Layanan Administrasi Sarana Prasarana & SDM Aparatur	100%	758.313.259		741.529.125	100%	800.000.000	100%	925.000.000	100%	1.020.000.000	100%	4.244.842.384	Sekretariat	
			1 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	- Jmlh Jasa Kantor Tersedia Tepat Waktu	8 Jasa	318.111.259	8 Jasa	340.000.000	8 Jasa	350.000.000	8 Jasa	425.000.000	8 Jasa	400.000.000	40 Jasa	1.833.111.259	Sekretariat	Kota Gtlo
				- Persentase Kelengkapan Data Base Kepegawaian Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				- Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Adm. Jasa Perkantoran & Sarana Prasarana	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				- Jumlah Dok. Kepegawaian - Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pengelolaan Kepegawaian	5 Dok 100%		5 Dok 100%		5 Dok 100%		5 Dok 100%		5 Dok 100%		25 Dok 100%			
			2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	- Persentase Ketersedian Sarana Prasarana Dan Oprasional Pemeliharaan	100%	348.602.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	1.898.602.000	Sekretariat	Kota Gtlo
			3 Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Sesuai Rencana	9 Org	91.600.000	10 Org	101.529.125	10 Org	100.000.000	10 Org	100.000.000	10 Org	120.000.000	59 Org	513.129.125	Sekretariat	Kota Gtlo

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 1 (2018)		Tahun 1 (2019)		Tahun 1 (2020)		Tahun 1 (2021)		Tahun 1 (2022)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

			<i>Program Perencanaan Monitoring, Evaluasi &amp; Pelaporan</i>	<i>Persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi Monitoring dan Pelaporan</i>	100%	260.177.250		260.000.000	100%	265.000.000	100%	279.988.763	100%	285.464.751	100%	1.350.630.764	Sekretariat	
			1 Perencanaan , Koordinasi, Monev, dan Penguatan Program Bidang Kesatuan Bangsa & Politik	- Jmlh Dok Perencanaan - Jmlh Dok Evaluasi - Persentase Keselaraan Pelaksanaan Prog. Dengan Dok. Perencanaan - Hasil Penilaian AKIP Badan KESBANGPOL Oleh Inspektorat	4 Dok 4 Dok 100%  B	150.000.000	4 Dok 4 Dok 100%  B	150.000.000	4 Dok 4 Dok 100%  B	150.000.000	4 Dok 4 Dok 100%  B	159.988.763	4 Dok 4 Dok 100%  B	170.000.000	20 Dok 20 Dok 100%  B	779.988.763	Sekretariat	Kota Gtlo
			2 Penataanusahaan dan Penyusunan Lap. Keuangan	- Jmlh Lap. Keuangan - Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Adm. Keuangan	2 Dok 100%	110.177.250	2 Dok 100%	110.000.000	2 Dok 100%	115.000.000	2 Dok 100%	120.000.000	2 Dok 100%	115.464.751	10 Dok 100%	570.642.001	Sekretariat	Kota Gtlo
JUMLAH						3.606.068.267		4.020.887.184		4.505.712.077		4.960.807.838		5.728.215.384		22.821.690.751		